

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2025 - 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Daerah Badan Kesbangpol (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma adalah dokumen perencanaan Badan Kesbangpol yang memuat kebijakan, rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Demikian RENSTRA 2025 - 2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma. Semoga RENSTRA ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tais, Oktober 2025

KEPALA BADAN

DADANG KOSASI, ST, MT

NIP. 19740406 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	14
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	16
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.2.2 Isu Strategis	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	18
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029	18
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.....	18
3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.....	19
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 2025-2029	20
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	21
BAB V PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau biasa disingkat SKPD adalah perangkat pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar pemerintahan berjalan dengan baik. Sebagai dasar hukum utama setelah UUD 1945 adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagai sebuah daerah otonomi berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2003 tentang Pemekaran Daerah Kabupaten/kota Muko-Muko, Seluma dan Kaur, maka Kabupaten Seluma dalam menjalankan fungsinya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan urusan umum pemerintahan di daerah perlu membuat sebuah rencana pembangunan yang efektif, efisien, dinamis dan berkemanusiaan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, dalam rangka mewujudkan hal tersebut dan sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2025 – 2029, dengan segala kekurangan yang ada, akan berusaha keras dan maksimal agar hal itu dapat terwujud. Oleh karenanya, Badan Kesbangpol Kab. Seluma telah berupaya merangkum dan mengejawantahkan serta akan mengaplikasikan visi misi tersebut kedalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Poitik Kabupaten Seluma tahun 2025 – 2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 : "Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya lainnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diganti menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

3. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266)
7. Peraturan Bupati Seluma No. 45 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Darerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.115.5.3406 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma Tahun 2025- 2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma.

2. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma selama 5 (lima) tahun ke depan mengacu dan menyelaraskan RPJMD Kabupaten Seluma 2025-2029;
3. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
3. Mendukung dan Mewujudkan program Bupati dan Wakil Seluma Periode 2025-2029;
4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat:

- a. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah;
- b. Sumber daya perangkat daerah;
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);

2. Subbab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

- 1.1 Uraian program;
- 2.1 Uraian kegiatan;
- 3.1 Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.1 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 5.1 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah; dan
- 6.1 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V : PENUTUPAN

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma No. 45 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma maka tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu bupati dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional, bidang ketahanan seni, budaya, agama,

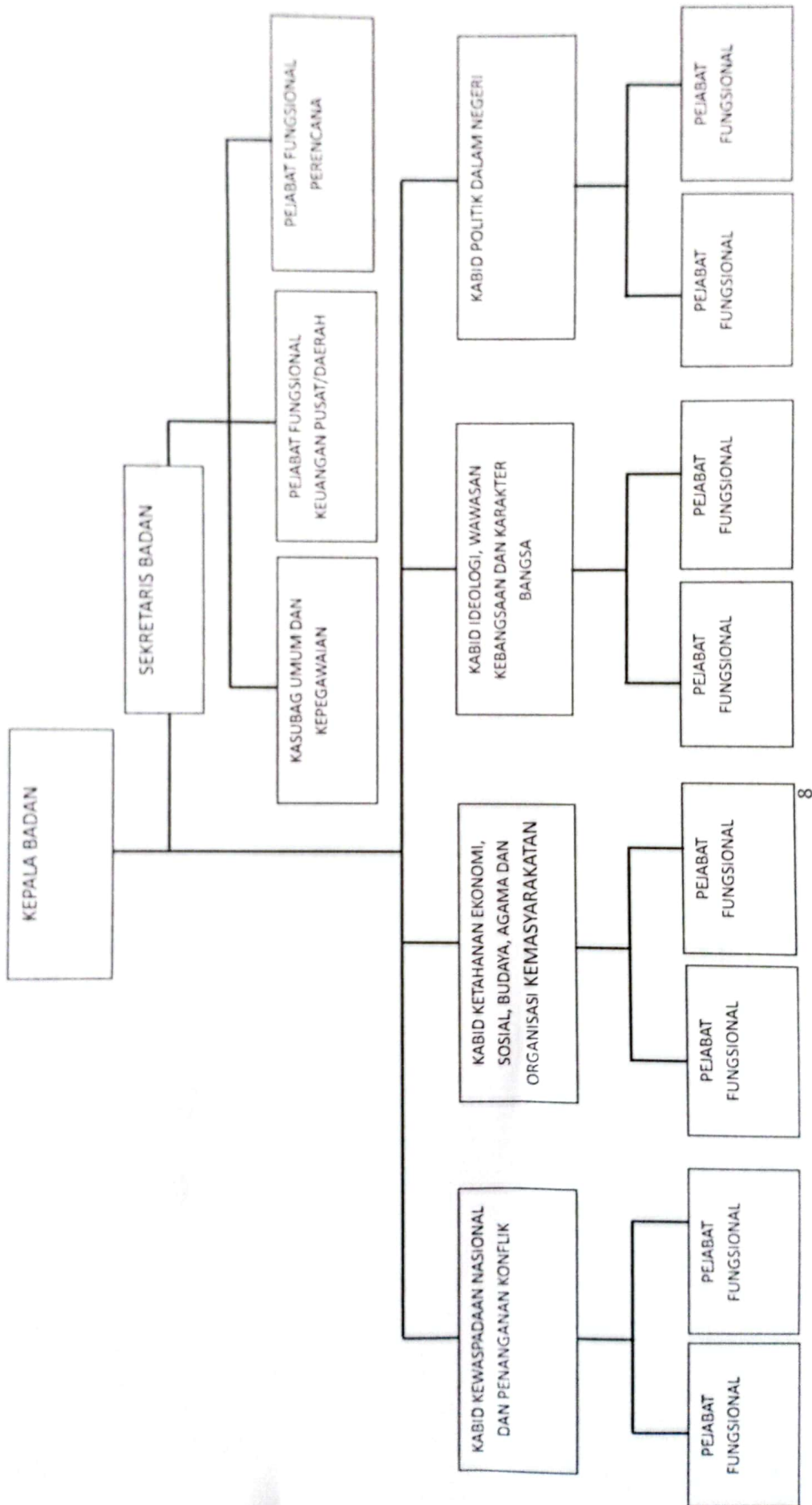
kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional dan evaluasi laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaksanaan pembinaan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi;
5. Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik komunal dan sosial;
7. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik komunal dan sosial, pengawasan orang asing;
8. Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran atau akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten;
9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, budaya, pembauran atau akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten;
10. Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten;
11. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa politik dan sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan

- partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pemilu pada skala kabupaten;
12. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 13. Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa di bidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan skala Kabupaten;
 14. Pemberian penghargaan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 15. Koordinasi Penetapan Kebijakan Operasional, pelaksanaan kegiatan, pembinaan di bidang kewaspadaan dini, cegah dini, kerjasama interkam, bina masyarakat, perbatasan, penanganan konflik pemerintahan, sosial, agama, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten; dan
 16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2022



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma didukung sebanyak 26 pegawai, dengan status kepegawaian 26 PNS, 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 7 Tenaga Harian Lepas (THL). Kualifikasi pendidikan PNS terdiri dari S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 22 orang, D3 sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 1 orang. Kualifikasi Pendidikan PPPK terdiri dari S1 sebanyak 1 orang, dan SMA sebanyak 2 orang.

Tabel. 2.1 : Klasifikasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	DOKTORAL	-	-	-
2.	PASCA SARJANA/S2	2	-	2
3.	SARJANA/S1	9	13	22
4.	DIPLOMA IV	0	0	0
5.	DIPLOMA III	0	1	1
6.	DIPLOMA I/II	0	0	0
7.	SLTA	1	0	1
JUMLAH		12	14	26

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kab. Seluma

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TATRGET RENSTRA OPD TAHUN KE --					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE --					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE --				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL			JUMLAH POTENSI KONFLIK YANG TIDAK MENJADI KONFLIK	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
				JUMLAH KONFLIK YANG SELESAT	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
				JUMLAH TERBENTUKNYA FKDM	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	100
				PERSENTASE KEMUNCULAN KONFLIK BARU PER TAHUN	100	0	0	0	100	60	0	0	0	85	60	0	0	0	80
	PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DAN MASYARAKAT			INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
				JUMLAH KASUS DAN KONFLIK AGAMA	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
				JUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT (Ormas) yang aktif		5	7	10	20		7	8	15	20		0,7	0,8	0,6	1,33
	PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT			TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
				JUMLAH KASUS POLITIK DI SETIAP PEMILU	0	0	0	0	90	0	0	0	0	70	0	0	0	0	77
	PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG NASIONALISME, WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI NEGARA			PEMBENTUKAN FPK	2	0	0	0	2	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
				PEMBENTUKAN PPWK	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				JUMLAH KADER BELA NEGARA MUJDA		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
				GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0

Dalam tabel 2.1 dapat di lihat bahwa ada beberapa target indicator kinerja yang tidak tercapai, seperti :

1. Jumlah Ormas yang aktif, pada tahun 2023 dan 2024 target yang ditetapkan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan kekurangan anggaran dan kurangnya sosialisasi, serta pemantauan terhadap aktivitas ormas yang beroperasi di kabupaten Seluma
2. Selama 5 tahun tidak ada penambahan jumlah kader bela Negara, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya anggaran yang ada di badan Kesbangpol
3. Selama 5 tahun program kegiatan yang bertujuan untuk pembentukan dan peningkatan Gerakan Nasional Revolusi Mental tidak terlaksana, debabkan oleh ketidaktersediaan anggaran

Tabel 2.3 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesbangpol

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE – (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TAHUN KE – (%)										RATA-RATA PERTUMBUHAN											
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REAL ISASI
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
1																																
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	51.200.000	9.400.000	19.410.700	19.958.660	25.000.000	51.200.000	0	17.847.700	19.538.000	21.747.922	100	0	122	64	87																22.066.724	
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	0	8.876.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	0	2.034.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	0	8.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.922.334.479	2.830.597.705	2.319.772.028	2.756.761.272	2.997.800.879	1.858.597.037	423.724.699	1.764.340.038	2.489.055.467	2.763.787.784	97	20	95	82	64																1.859.901.065	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.672.000		0	0	0	60.672.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.672.000	
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	0	72.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE - (Rp)						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -						RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TAHUN KE - (%)										RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																								
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	0	76.920,00 0	71.780,00 0	96.160,00 0	113.400,000		0	0	74.340,000	98.160,000	111.940,000		0	0	98	100	91						91.380,000	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	0	6.046,000	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0						0	
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	0	0	0	6.240,000	5.240,000		0	0	0	5.240,000	5.100,000		0	0	0	100	95						7.170,000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000,000	2.452,000	6.532,870	7.394,930	4.886,750		5.000,000	2.000,000	6.532,870	4.151,450	1.500,000		100	20	268	85	33						3.856,854	
Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000,000	5.019,800	8.894,050	11.246,010	11.546,300		10.000,000	2.000,000	8.891,650	8.248,000	7.500,000		100	0	213	79	57						7.220,330	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.887,700	0	26.322,250	0	0		20.887,700	0	26.322,250	0	0		100	0	123	0	0						27.645,350	
Penyediaan bahan logistic kantor	0	31.960,000	0	33.072,370	30.074,300		0	4.000,000	0	23.870,500	17.544,320		0	0	0	85	78						15.138,473	
Penyediaan barang cetakan dan pengusutan	5.149,000	24.010,000	6.032,280	11.086,000	11.676,800		46.038,780	2.000,000	6.222,000	8.682,800	8.671,500		85	0	193	86	86						13.842,810	
Penyediaan bahan bangunan	12.480,000	12.020,000	0	0	11.000,000		20.000,000	4.000,000	7.866,000	3.770,000	11.166,000		97	0	98	37	100						5.212,200	
Penyediaan bahan bangunan dan peralatan	0	20.000,000	0	0	25.000,000		0	2.000,000	20.000,000	25.760,000	13.166,000		0	0	100	29	56						14.565,000	
Penyediaan (rakun) furnitur	0	0	0	0	0		157.000,000	0	0	0	0		100	0	0	0	0						17.200,000	
Penyediaan (rakun) furnitur	12.480,000	0	0	0	0		30.560,000	0	79.211,860	94.838,977	36.938,166		100	0	136	0	114						71.149,907	
Penyediaan (rakun) furnitur dan konsultasi SKPD	12.480,000	0	0	0	0		30.560,000	0	79.211,860	94.838,977	36.938,166		100	0	136	0	114						71.149,907	

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE – (Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -						RASIO ANTARA REALISASI & ANGGARAN TAHUN KE – (%)										RATA-RATA PERTUMBUHAN						
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REAL ISASI	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																												
Penyediaan jasa surat menyurat	3.982.500	2.680.000	7.647.500	11.600.000 0	14.000.000	3.981.000	1.400.000	7.637.500	8.750.000	8.100.000	100	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000	30.000.000 0	35.810.000 0	30.933.600 0	32.799.710	30.000.000	9.600.000	28.177.000	27.980.000	20.481.400	92	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	0	79.200.000 0	94.008.400 0	109.680.0 00	120.000.000	0	0	86.250.000	102.000.000	120.000.000	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	86.500.000	66.500.000 0	104.149.3 00	80.118.66 5	81.132.750	83.545.200	11.000.000	103.610.000	79.388.000	73.315.000	96	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	0	2.500.000	5.072.000	0	0	0	2.000.000	5.072.000	0	0	0	20	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa pengangkutan	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa publikasi dan dokumentasi	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pada data yang ditampilkan di T.C23 dan T.C.24 dapat dilihat bahwa ada beberapa program kegiatan yang tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan ketidak tersediaan anggaran yang di terdapat dalam DPA Badan Kesbangpol. Anggaran di Badan Kesbangpol hanya tersedia untuk belanja HIBAH, sementara kebutuhan dasar anggaran untuk program kegiatan pada Badan Kesbangpol sangat kecil bahkan tidak disediakan anggaran. Selama 5 tahun tidak ada belanja modal pada Badan Kesbangpol, sehingga sarana dan prasarana penunjang kinerja ASN di Badan Kesbangpol tidak tersedia yang update.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma meliputi hampir seluruh masyarakat Kabupaten Seluma tanpa terkecuali. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah, khususnya anggaran pada DPA Badan kesbangpol memunculkan layanan spesifik sesuai dengan Program kegiatan yang diampu oleh Badan kesbangpol. Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma, sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Layanan yang diberikan oleh Badan kesbangpol berupa informasi tentang potensi masalah dan potensi strategis yang mungkin timbul di Kabupaten Seluma pada tahun berjalan. Kelompok sasaran yang memanfaatkan layanan informasi, berasal dari semua lapisan masyarakat, khususnya instansi yang mengampu urusan intelijen (Kodim, Polres, Kejaksaan, BIN dan organisasi sejenis). Selain itu, kelompok sasaran layanan lainnya yang terkait dengan penanganan potensi masalah dan masalah strategis adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Seluma (Forkopimda).

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kelompok sasaran layanan pada program ini adalah masyarakat pada satuan wilayah tertentu dan berkebutuhan khusus. Penentuan wilayah dan kebutuhannya didasarkan pada fakta lapangan tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengalami penurunan nilai dan kualitasnya. Contohnya pelajar yang tidak/belum hafal Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan Forum Pembauran Kebangsaan (FKPB).

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Kelompok sasaran layanan program ini adalah anggota partai politik yang harus mendapatkan Pendidikan politik melalui bantuan keuangan kepada partai politik yang berada di parlemen. Kelompok sasaran lainnya adalah masyarakat anggota partai politik non parlemen yang dibiayai oleh Pemerintah melalui Pendidikan politik oleh Badan kesbangpol.

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kelompok sasaran layanan pada program ini adalah pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan yang masuk kategori aktif yang ditunjukkan dengan masih adanya kepengurusan pada Ormas tersebut.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kelompok sasaran layanan pada program ini adalah organisasi masyarakat yang bergerak dibidang keagamaan (FKUB) dan daerah rawan peredaran narkoba.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Bentuk pelayanan pada program ini semata-mata mendukung kelancaran kegiatan teknis bidang sehingga kegiatan berjalan lancar tanpa hambatan. Kelompok sasaran layanan merupakan internal Badan kesbangpol baik administrasi maupun keuangan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Perangkat Daerah yang terkait langsung dan merupakan proses tindak lanjut adalah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam memperlancar kegiatan survey, penelitian, magang, KKN dan lain-lain kegiatan pengambilan data, baik di masyarakat maupun Instansi Pemerintah. Intansi Vertical yang terkait dengan tugas Badan kesbangpol antara lain Kodim, Polres, Kejaksaan, BIN, BNN, Kemenkumham, Imigrasi, Pos Angkatan Laut dan instansi sejenis pengampu urusan intelejen.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Deteksi dini dan cegah dini yang tidak optimal	Masih banyak daerah yang belum dapat terjangkau	a. Sarana kendaraan dinas yang tidak ada b. Anggaran kegiatan yang tidak tersedia c. Sumberdaya SDM yang kurang
2.	Tidak berjalannya program kegiatan pokok yang menjadi prioritas dan target kinerja	Tidak tersedia dan tidak disediakan anggaran oleh Tim TAPD kabupaten	d. "tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang masih dianggap belum penting oleh Pemda"

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada sub 2.2.1 di atas tadi, maka metode yang digunakan oleh Badan Kesbangpol dalam menentukan isu – isu strategis Badan Kesbangpol Seluma adalah dengan Metode SWOT.

Melalui metode SWOT tersebut, maka Badan Kesbangpol kabupaten Seluma menetapkan isu-isu strategis, yaitu ;

- Masih lemahnya system perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi
- Masih banyaknya potensi dan konflik yang belum terselesaikan
- Masih lemahnya data, peta politik dan peta daerah rawan konflik
- Belum mampu secara maksimal menjadi "*mata dan telinga Bupati*"
- Rendahnya anggaran belanja kegiatan pada Badan Kesbangpol
- Kurangnya staf dan masih rendahnya SDM, sarana dan prasana untuk aparaturnya Badan Kesbangpol

Tabel 2.3 Teknik Penyimpulan Isu Strategi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Penguasaan data sosial politik	1. Kurangnya sumber daya 2. Kurang optimalnya pendataan ormas	1. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penguatan mitigasi dan penanggulangan bencana	1. Pengelolaan sampah Badan Kesbangpol perlu berperan dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait. 2. Alih fungsi lahan Badan Kesbangpol perlu berkoordinasi dengan instansi lain terkait pengaturan tata ruang wilayah, mencegah alih fungsi lahan secara ilegal dan menjamin pengelolaan lahan secara berkelanjutan	1. Pengelolaan sampah Badan Kesbangpol perlu berperan dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait. 2. Kerusakan lingkungan Badan Kesbangpol perlu memantau potensi konflik yang timbul akibat kerusakan lingkungan dan melakukan Langkah-langkah pencegahan.	1. Pengelolaan sampah Badan Kesbangpol perlu berperan dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait. 2. Kerusakan lingkungan Badan Kesbangpol perlu memantau potensi konflik yang timbul akibat kerusakan lingkungan dan melakukan Langkah-langkah pencegahan.	1. Masih lemahnya system perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi 2. Masih banyaknya potensi dan konflik yang belum terselesaikan 3. Masih lemahnya data, peta politik dan peta daerah rawan konflik 4. Belum mampu secara maksimal menjadi "mata dan telinga Bupati" 5. Rendahnya anggaran belanja kegiatan pada Badan Kesbangpol 6. Kurangnya staf dan masih rendahnya SDM, sarana dan prasarana untuk aparat Badan Kesbangpol

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029 harus selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025 – 2029, dalam arti sama atau memunculkan tujuan lain dengan muatan yang sama. Tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029, sama dengan sasaran RPJMD Kabupaten Seluma, yaitu: Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM, dengan Indikator : Indeks Demokrasi Indonesia. Target yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (mulai tahun 2025 – 2029) sebesar : 60 (pada tahun 2025), 75 (pada tahun 2026), 75 (pada tahun 2027), 75 (pada tahun 2028), 75 (pada tahun 2029), dan 75 (pada tahun 2030).

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 merupakan turunan dari Tujuan Renstra PD tahun 2025 – 2029 dan harus memenuhi unsur keselarasan serta mendukung tercapainya Tujuan Renstra PD tahun 2025 – 2029. Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029, yaitu :

1. Meningkatnya tata Kelola kinerja OPD, Indikator : nilai evaluasi SAKIP OPD, dengan formulasi : nilai AKIP OPD hasil evaluasi Inspektorat Kab. Seluma. Target 68,65 (pada tahun 2025), 69,42 (pada tahun 2026), 70,19 (pada tahun 2027), 70,96 (pada tahun 2028), 71,73 (pada tahun 2029), 72,5 (pada tahun 2030).
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, Indikator : persentase Pendidikan politik pada kader partai politik, target : 100% (dari tahun 2025 – 2030), dan persentase peningkatan pemilih pemula, dengan target : 60% (pada tahun 2025), 65% (pada tahun 2026), 70% (pada tahun 2027), 75% (pada tahun 2028), 80% (pada tahun 2029), dan 85% (pada tahun 2030). Formulasi untuk kedua indikator tersebut sama, yaitu: jumlah tahun n dibagi jumlah tahun n-1 dikali 100%.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, Indikator : indeks harmoni Indonesia, dengan formulasi : indeks harmoni tahun n dikurang indeks harmoni tahun n-1. Target : 40 (pada tahun 2025), 48 (pada tahun 2026), 50 (pada tahun 2027), 52 (pada tahun 2028), 54 (pada tahun 2029), dan 60 (pada tahun 2030).

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma menyusun strategi secara bertahap. Pentahapan ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan sistematis, terarah, serta mampu menjawab dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang di daerah. Serta, pentahapan dirancang untuk saling menguatkan, sehingga pada akhir periode perencanaan, tujuan dan sasaran Renstra dapat tercapai secara optimal, terutama dalam mewujudkan stabilitas daerah, memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan kualitas demokrasi, dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran jangka menengah pada Badan Kesbangpol di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM		Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	60	75	75	75	75	75	
			Persentase Pendidikan politik pada kader partai politik	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Tingkat Pemilih Pemula	60	65	70	75	80	85	
			Indeks Harmoni Indonesia	40	48	50	52	54	60	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Nilai evaluasi SAKIP OPD	68,65	69,42	70,19	70,96	71,73	72,5	
		Meningkatnya tata Kelola kinerja OPD								

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Arah kebijakan Renstra PD harus selaras dengan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2025 – 2029. Tabel 3.2 memberikan arahan dalam menentukan arah kebijakan PD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Arah kebijakan yang ditetapkan adalah :

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Indeks Demokrasi Indonesia	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Membentuk dan melanjutkan program kegiatan pokok , seperti : 4. Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 5. Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 6. Fasilitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 7. Fasilitas Ormas, PPWK dan Jaringan Informasi Perumusan, perencanaan anggaran serta Monev Laporan Catatan Akhir Keuangan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma tahun 2025 – 2029, diperlukan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terarah, terukur, serta berkesinambungan. Penyusunan program dan kegiatan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada Bab III, sehingga terdapat keterkaitan antara perencanaan strategis dan implementasi operasional. Seluruh program dan kegiatan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah, prioritas Pembangunan, serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

4.1 Uraian Program

Program perangkat daerah berfungsi menjabarkan strategi dan kebijakan ke dalam implementasi yang terukur. Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma Menyusun program yang selaras dengan tugas, fungsi, serta mendukung tujuan dan sasaran Renstra 2025 -2029. Program ini disusun dengan memperhatikan isu strategis, kebutuhan masyarakat, dan prioritas Pembangunan daerah untuk mendukung stabilitas, demokrasi, wawasan kebangsaan, serta penguatan kelembagaan. Rancangan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma tahun 2025-2029 terdapat 6 (Enam) Program, yaitu sebagai berikut:

- a. Program penunjang urusan pemerintah
- b. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
- c. Program peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan politik melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- d. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- e. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
- f. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Secara lebih rinci, program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma selama periode perencanaan dituangkan dalam Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma berikut.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026			2027			2028			2029				2030	
				TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.813.853.251.00		13.821.331.155.00		13.828.988.370.00		13.836.540.012.00		13.844.902.750.00				
						3.875.002.011.00		3.876.414.834.00		3.877.834.579.00		3.879.251.283.00		3.880.694.874.00				
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	65	66	67	3.875.002.011.00	68	3.876.414.834.00	69	3.877.834.579.00	70	3.879.251.283.00	71	3.880.694.874.00			Dinas Badan yang menanganai Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						828.216.200.00		832.274.459.00		836.352.804.00		840.450.731.00		844.568.940.00				
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	25	25	25.5	828.216.200.00	26	832.274.459.00	26.5	836.352.804.00	27	840.450.731.00	27.5	844.568.940.00			Dinas Badan yang menanganai Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						992.200.000.00		992.200.000.00		992.200.000.00		992.200.000.00		992.200.000.00				
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	992.200.000.00	100	992.200.000.00	100	992.200.000.00	100	992.200.000.00	100	992.200.000.00			Dinas Badan yang menanganai Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.04 - PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						15.000.000.00		16.500.000.00		18.150.000.00		19.965.000.00		21.981.500.00				
Meningkatnya kesiapan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	40	42	45	15.000.000.00	46	16.500.000.00	50	18.150.000.00	51	19.965.000.00	52	21.981.500.00			Dinas Badan yang menanganai Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						43.863.040.00		44.077.969.00		44.293.951.00		44.510.992.00		44.725.095.00				
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kabinjauan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penggunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Diaktakan (Persentase)	20	20	23	43.863.040.00	23	44.077.969.00	24	44.293.951.00	24	44.510.992.00	25	44.725.095.00			Dinas Badan yang menanganai Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						8.059.572.000.00		8.059.863.903.00		8.060.157.236.00		8.060.452.006.00		8.060.748.221.00				
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	100	8.059.572.000.00	100	8.059.863.903.00	100	8.060.157.236.00	100	8.060.452.006.00	100	8.060.748.221.00			Dinas Badan yang menanganai Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik		

4.2 Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan merupakan penjabaran operasional dari setiap program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Setiap kegiatan disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mencerminkan peran Badan Kesbangpol sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui fungsi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, politik dalam negeri, serta fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan kehidupan beragama.

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan, dengan memperhatikan dinamika sosial politik daerah serta arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2025–2029. Secara lebih rinci, kegiatan perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma selama periode perencanaan dituangkan dalam Tabel 4.2 teknik merumuskan Program/kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma berikut.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN
8.01 0.00.0.00.06.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana	Tercapainya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertuhan dan keamanan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah SK PPHK yang diterbitkan	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)		
					Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)		
					Capaian Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Penguatan)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Segarlah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Segarlah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Segarlah Kebangsaan	
				Jumlah SK PPHK yang diterbitkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Segarlah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Segarlah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Segarlah Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RP/MD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Peningkatan Omas, Evaluasi dan Mediasi Berkeadilan Omas, Peningkatan Omas dan Omas Ating di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Peningkatan Omas, Evaluasi dan Mediasi Berkeadilan Omas, Peningkatan Omas dan Omas Ating di Daerah	(08)
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat		Perilaku Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan Peningkatan Narkotika, Fasilitas Ketahanan Umat Berkeadilan dan Peningkatan Ketahanan di Daerah yang Disusun (Persepsi)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENJEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Presentasi pengguna NARCOTIKA dan Miras	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan Peningkatan Narkotika, Fasilitas Ketahanan Umat Berkeadilan dan Peningkatan Ketahanan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan Peningkatan Narkotika, Fasilitas Ketahanan Umat Berkeadilan dan Peningkatan Ketahanan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan Peningkatan Narkotika, Fasilitas Ketahanan Umat Berkeadilan dan Peningkatan Ketahanan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan Peningkatan Narkotika, Fasilitas Ketahanan Umat Berkeadilan dan Peningkatan Ketahanan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0001 - Perumusan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pendidikan Peningkatan Narkotika, Fasilitas Ketahanan Umat Berkeadilan dan Peningkatan Ketahanan di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penggunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penggunaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penggunaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penggunaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Persentase peningkatan UMKM		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penggunaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dausun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penggunaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dausun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penggunaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penggunaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penggunaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penggunaan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				presentase Potensi Konflik yang Tidak Menjadi konflik	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
				Jumlah potensi konflik yang diselesaikan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
				Jumlah Rakor Forkopimda	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semester SKPD (Laporan)	8.01.01.2.00.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semester SKPD	
				Jumlah pelapis pengrus dan penyempit barang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.2.00 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan penerangan kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8.01.01.2.00.0008 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan penerangan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diaudit (Paket)	8.01.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Penyediaan Penerangan Rumah Tangga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diaudit (Paket)	8.01.01.2.00.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Komponen Penyediaan Penerangan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Diaudit (Paket)	8.01.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Diaudit (Paket)	8.01.01.2.00.0003 - Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	
				Jumlah Eksemplar Surat Kabarmagalah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diaudit (Paket)	8.01.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diaudit (Paket)	8.01.01.2.00.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Diaudit (Dokumen)	8.01.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Diaudit (Dokumen)	8.01.01.2.00.0008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.2.00.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah kll Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (09)
				Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	(09)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	
				Jumlah kali Penyelenggaraan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.08.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengadaan Laptop, printer, infokus, scanning dan drone	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah material dan alat pos lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Tenaga Pramubakti, Sopir dan Penjaga Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang kondusif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi lembaga ini.

Program dan kegiatan yang dirancang oleh Badan Kesbangpol mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan wawasan kebangsaan, fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan partai politik, pencegahan radikalisme dan konflik sosial, serta penguatan kelembagaan dan sinergi antar-stakeholder. Setiap kegiatan dirancang dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan, aspek pendanaan menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan implementasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan riil di lapangan, serta mempertimbangkan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Kolaborasi lintas sektor juga dioptimalkan guna mendukung pendanaan alternatif yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan yang ada, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam-program-program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan di gambarkan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
8.01 - KESALAHAN BANGSA DAN POLITIK	(02)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENGARA				13.813.853.251,00		13.827.351.183,00		13.828.588.370,00		13.838.840.812,00		13.844.802.710,00				
Mengunjungi Tata Nelayan Kephik OPD		65		3.875.002.011,00		3.878.414.824,00		3.877.834.576,00		3.878.291.282,00		3.882.864.874,00				
8.01.01.2.01 - Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.875.002.011,00	68	3.878.414.824,00	69	3.877.834.576,00	70	3.878.291.282,00	71	3.882.864.874,00				
Jumlah Laporan		12		6.668.738,00		6.667.718,00		6.705.788,00		6.723.848,00		6.742.162,00				
8.01.01.2.01.001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.668.738,00		6.667.718,00		6.705.788,00		6.723.848,00		6.742.162,00				
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		12		6.668.738,00	12	6.667.718,00	12	6.705.788,00	12	6.723.848,00	12	6.742.162,00				
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.586.070.884,00		3.586.070.884,00		3.586.070.884,00		3.586.070.884,00		3.586.070.884,00				
Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)		27	35	3.513.563.284,00	35	3.513.563.284,00	35	3.513.563.284,00	35	3.513.563.284,00	35	3.513.563.284,00				
8.01.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.513.563.284,00		3.513.563.284,00		3.513.563.284,00		3.513.563.284,00		3.513.563.284,00				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		27	35	3.513.563.284,00	35	3.513.563.284,00	35	3.513.563.284,00	35	3.513.563.284,00	35	3.513.563.284,00				
persentase keseluruhan laporan keuangan sesuai SAP		12	12	72.507.600,00	12	72.507.600,00	12	72.507.600,00	12	72.507.600,00	12	72.507.600,00				
8.01.01.2.02.003 - Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD				69.507.600,00		69.507.600,00		69.507.600,00		69.507.600,00		69.507.600,00				
Terdaksainya Penerimaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD		12	12	69.507.600,00	12	69.507.600,00	12	69.507.600,00	12	69.507.600,00	12	69.507.600,00				
8.01.01.2.02.007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00				
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETEPANGAN	
			2026			2027			2028			2029					
			TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.800.000.00		3.800.000.00		3.800.000.00		3.800.000.00		3.800.000.00		3.800.000.00			
Jumlah Laporan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah pada SPPD (Laporan)		12	12	3.800.000.00	12	3.800.000.00	12	3.800.000.00	12	3.800.000.00	12	3.800.000.00	12	3.800.000.00	3.800.000.00		
8.01.01.2.03.009 - Penyalahgunaan Barang Milik Daerah pada SPPD				3.800.000.00		3.800.000.00		3.800.000.00		3.800.000.00		3.800.000.00		3.800.000.00			
Terdapatnya Penyalahgunaan Barang Milik Daerah pada SPPD (Laporan)		12	12	3.800.000.00	12	3.800.000.00	12	3.800.000.00	12	3.800.000.00	12	3.800.000.00	12	3.800.000.00	3.800.000.00		
8.01.01.2.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				62.827.400.00		63.149.960.00		63.474.084.00		63.798.818.00		64.127.139.00		64.451.277.00			
Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Perangkat Daerah yang Disalurkan (Dokumen)		1	1	6.029.400.00	1	6.029.400.00	1	6.029.400.00	1	6.029.400.00	1	6.029.400.00	1	6.029.400.00	6.029.400.00		
8.01.01.2.08.009 - Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan				6.000.000.00		6.029.400.00		6.029.400.00		6.029.400.00		6.029.400.00		6.029.400.00			
Terdapatnya Bahan Baku dan Perlengkapan Perangkat Daerah yang Disalurkan (Dokumen)		1	1	6.000.000.00	1	6.029.400.00	1	6.029.400.00	1	6.029.400.00	1	6.029.400.00	1	6.029.400.00	6.029.400.00		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD (Laporan)		12	12	22.400.000.00	12	22.509.780.00	12	22.620.058.00	12	22.730.336.00	12	22.842.277.00	12	22.953.218.00	22.953.218.00		
8.01.01.2.08.009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD				22.400.000.00		22.509.780.00		22.620.058.00		22.730.336.00		22.842.277.00		22.953.218.00			
Terdapatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD (Laporan)		12	12	22.400.000.00	12	22.509.780.00	12	22.620.058.00	12	22.730.336.00	12	22.842.277.00	12	22.953.218.00	22.953.218.00		
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Temu (Laporan)		1	1	7.380.000.00	1	7.350.372.00	1	7.380.381.00	1	7.407.858.00	1	7.437.974.00	1	7.468.090.00	7.468.090.00		
8.01.01.2.08.008 - Fasilitas Kunjungan Temu				7.380.000.00		7.350.372.00		7.380.381.00		7.407.858.00		7.437.974.00		7.468.090.00			
Terdapatnya Fasilitas Kunjungan Temu (Laporan)		1	1	7.380.000.00	1	7.350.372.00	1	7.380.381.00	1	7.407.858.00	1	7.437.974.00	1	7.468.090.00	7.468.090.00		
Jumlah Paket Komponen Bahan Cetak dan Penggandaan yang Disalurkan (Paket)		1	1	5.000.000.00	1	5.024.500.00	1	5.049.120.00	1	5.073.961.00	1	5.098.723.00	1	5.123.584.00	5.123.584.00		
8.01.01.2.08.005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000.00		5.024.500.00		5.049.120.00		5.073.961.00		5.098.723.00		5.123.584.00			
Terdapatnya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disalurkan (Paket)		1	1	5.000.000.00	1	5.024.500.00	1	5.049.120.00	1	5.073.961.00	1	5.098.723.00	1	5.123.584.00	5.123.584.00		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Peralengkapan yang Disalurkan (Paket)		1	1	3.031.370.00	1	3.048.224.00	1	3.065.180.00	1	3.082.135.00	1	3.099.090.00	1	3.116.045.00	3.116.045.00		
8.01.01.2.08.001 - Penyediaan Listrik dan Peralengkapan yang Disalurkan				3.031.370.00		3.048.224.00		3.065.180.00		3.082.135.00		3.099.090.00		3.116.045.00			
Terdapatnya Komponen Instalasi Listrik dan Peralengkapan yang Disalurkan (Paket)		1	1	3.031.370.00	1	3.048.224.00	1	3.065.180.00	1	3.082.135.00	1	3.099.090.00	1	3.116.045.00	3.116.045.00		
Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disalurkan (Paket)		1	1	6.116.035.00	1	6.146.004.00	1	6.176.118.00	1	6.206.382.00	1	6.236.793.00	1	6.267.304.00	6.267.304.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
8.01.2.06.0003 - Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	6.116.035,00	1	6.146.004,00	1	6.176.119,00	1	6.206.352,00	1	6.236.793,00		6.236.793,00				
Perencanaan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perencanaan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	13.000.000,00	12	13.063.700,00	12	13.127.712,00	12	13.192.038,00	12	13.256.879,00		13.256.879,00				
8.01.2.06.0002 - Penyediaan Perawatan dan Perencanaan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perencanaan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	13.000.000,00	12	13.063.700,00	12	13.127.712,00	12	13.192.038,00	12	13.256.879,00		13.256.879,00				
8.01.2.07 - Pengadaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
8.01.2.07.0006 - Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.617.400,00	1	2.237.825,00	1	2.861.291,00	1	3.487.811,00		3.487.811,00				
8.01.2.07.0006 - Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.617.400,00	1	2.237.825,00	1	2.861.291,00	1	3.487.811,00		3.487.811,00				
8.01.2.08 - Penyediaan Jasa Lainnya yang Disediakan																		
8.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	30.622.296,00	12	30.772.345,00	12	30.923.130,00	12	31.074.653,00	12	31.226.919,00		31.226.919,00				
8.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	30.622.296,00	12	30.772.345,00	12	30.923.130,00	12	31.074.653,00	12	31.226.919,00		31.226.919,00				
8.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	5.024.500,00	12	5.049.120,00	12	5.073.661,00	12	5.098.723,00		5.098.723,00				
8.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	5.024.500,00	12	5.049.120,00	12	5.073.661,00	12	5.098.723,00		5.098.723,00				
8.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00		120.000.000,00				
8.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00		120.000.000,00				
8.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	59.211.690,00	3	59.462.027,00	3	59.773.738,00	3	60.086.830,00	3	60.341.308,00		60.341.308,00				
8.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	59.211.690,00	3	59.462.027,00	3	59.773.738,00	3	60.086.830,00	3	60.341.308,00		60.341.308,00				
8.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10		10		10		10		10							

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU NEGASATIS TAHUN												PERSANGAN CASAN	KETESANGAN
			2028		2027		2026		2025		2024		2023			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.02.2.01.2011 - Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terdapatnya penguasaan ketrampilan peserta		40	40	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00	10.000.000.00		
Jumlah SK PPH yang diberikan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
8.01.02.2.01.2024 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
Terdapatnya koordinasi di Bidang Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
Jumlah SK PPH yang diberikan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
8.01.02.2.01.2023 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
Terdapatnya koordinasi di Bidang Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
Jumlah SK PPH yang diberikan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
8.01.02.2.01.2022 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
Terdapatnya koordinasi di Bidang Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
Jumlah SK PPH yang diberikan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
8.01.02.2.01.2021 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
Terdapatnya koordinasi di Bidang Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
Jumlah SK PPH yang diberikan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00		
8.01.02.2.01.2020 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Urusan Kelembagaan dan Kelembagaan		15	25	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00	9.874.484.00</									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Menyusun laporan tahunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Pemerataan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Masyarakat	20	23	43.863.042.00	23	44.077.868.00	24	44.293.857.00	24	44.512.862.00	25	44.729.790.00	8.01.2.05.2.02.28.0002 - Badan Keuangan Daerah dan Daerah			
8.01.03.2.01 - Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Masyarakat				43.863.042.00		44.077.868.00		44.293.857.00		44.512.862.00		44.729.790.00				
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Masyarakat	12	12	34.500.000.00	12	34.468.070.00	12	34.638.864.00	12	34.826.850.00	12	34.877.237.00				
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Masyarakat				34.500.000.00		34.468.070.00		34.638.864.00		34.826.850.00		34.877.237.00				
Penyusunan laporan tahunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Penyusunan Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Masyarakat	12	12	34.500.000.00	12	34.468.070.00	12	34.638.864.00	12	34.826.850.00	12	34.877.237.00				
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Laporan Tahunan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Masyarakat				34.500.000.00		34.468.070.00		34.638.864.00		34.826.850.00		34.877.237.00				
Penyusunan laporan tahunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Penyusunan Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Masyarakat	0	1	1.000.000.00	1	1.000.000.00	1	1.000.000.00	1	1.000.000.00	1	1.000.000.00				
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Laporan Tahunan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Masyarakat				1.000.000.00		1.000.000.00		1.000.000.00		1.000.000.00		1.000.000.00				
Penyusunan laporan tahunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Penyusunan Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Masyarakat	0	1	1.000.000.00	1	1.000.000.00	1	1.000.000.00	1	1.000.000.00	1	1.000.000.00				
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Laporan Tahunan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Masyarakat				1.000.000.00		1.000.000.00		1.000.000.00		1.000.000.00		1.000.000.00				

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
8.01.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dit. Keta. Sama Intelin. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
				2.650.000,00		2.550.500,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terdapatnya Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dit. Keta. Sama Intelin. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		15	30	2.650.000,00	30	2.550.500,00	30	2.500.000,00	30	2.500.000,00	30	2.500.000,00		2.500.000,00		
Jumlah Orang yang Mengikuti pelatihan/latihan di Bidang Kewaspadaan Dit. Keta. Sama Intelin. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	1	55.572.000,00	1	55.843.803,00	1	55.157.236,00	1	55.452.008,00	1	55.748.221,00				
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dit. Keta. Sama Intelin. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1	1		1		1		1		1					
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dit. Keta. Sama Intelin. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		30	30		30		30		30		30					
8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dit. Keta. Sama Intelin. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50.572.000,00		50.853.802,00		50.157.236,00		50.452.008,00		50.748.221,00				
Terdapatnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dit. Keta. Sama Intelin. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1	1	50.572.000,00	1	50.853.802,00	1	50.157.236,00	1	50.452.008,00	1	50.748.221,00				
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dit. Keta. Sama Intelin. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kerja Asing dan Lintase Aang, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tetapannya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kerja Asing dan Lintase Aang, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lintase Aang, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	30	30	2.500.000,00	30	2.500.000,00	30	2.500.000,00	30	2.500.000,00	30	2.500.000,00		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tetapannya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
penerapan Protesis Konflik yang Tidak Merusak konflik	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kerja Asing dan Lintase Aang, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Baku Prumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lintase Aang, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tetapannya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kerja Asing dan Lintase Aang, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lintase Aang, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		

4.4 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka menyelaraskan perencanaan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah, setiap perangkat daerah diharapkan menyusun sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Namun, setelah dilakukan penelaahan terhadap tugas, fungsi, serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma, diketahui bahwa terdapat sub kegiatan yang secara langsung masuk dalam kategori mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam dokumen perencanaan daerah.

Oleh karena itu, Tabel 4.4 berikut menunjukkan bahwa pada periode Renstra Tahun 2025–2029, sub kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.01.0.00.0.00.06.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
1.	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kembangkan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
2.	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kembangkan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma tahun 2025 – 2029:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	positif	Persentase	25	25	25,5	26	26,5	27	27,5	
3	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	positif	Nilai	66	66	67	68	69	70	71	
4	Penerbitan Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma tahun 2025 – 2029 ini merupakan penjabaran Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Seluma untuk 5 (lima) tahun mendatang, RENSTRA ini berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunannya mengacu kepada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma 2025 – 2029. RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma.

Demikianlah RENSTRA Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma tahun 2025-2029 ini kami susun, semoga bermanfaat dan selanjutnya Renstra ini kami harapkan kepada BAPPEDA Kabupaten Seluma untuk dilakukan verifikasi, sehingga jika terjadi kesalahan dalam penyusunan Renstra ini akan segera kami perbaiki.

Tais, Oktober 2025

Kepala Badan

DADANG KOSASI, ST, MT
NIP. 19740406 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. RA Kartini No.17 Komplek Perkantoran Pemda Seluma
Telp. (0736) 91292 No Fax. 91292 Kode Pos 38576 Email. badankesbangpol83@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SELUMA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN
2025-2029 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa untuk menyusun dokumen resmi yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, indikator kegiatan dan acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai tolak ukur capaian kinerja 5 (lima) tahun kedepan maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Seluma Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Bupati Seluma Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720); Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Bupati Seluma Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Seluma Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan daerah;

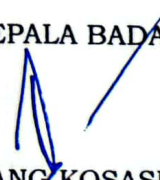
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Kabupaten Seluma Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TAIS
Pada Tanggal Oktober 2025

KEPALA BADAN,


H. DADANG KOSASI, ST. MT
NIP.19740406 200012 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
SELUMA

NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 OKTOBER 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2025

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	KEPALA BADAN	PENANGGUNG JAWAB	
2.	SEKRETARIS	KETUA	
3.	KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	WAKIL KETUA	
4.	PERENCANA AHLI MUDA	SEKRETARIS	
5.	KABID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ANGGOTA	
6.	KABID IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	ANGGOTA	
7.	KABID POLITIK DALAM NEGERI	ANGGOTA	
8.	ANALIS KEUANGAN PUSAT / DAERAH AHLI MUDA	ANGGOTA	
9.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
10.	ANALIS PERENCANAAN PENGANGGARAN	ANGGOTA	
11.	PERENCANA AHLI PERTAMA	ANGGOTA	

KEPALA BADAN
KESBANGPOL KABUPATEN SELUMA


H.DADANG KOSASI, S.T., M.T
NIP.19740406 200012 1 001